

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Metode Pendekatan.....	14
C. Teknik Pengumpulan Data.....	15
D. Teknik Analisis Data	16
1.7 Lokasi Penelitian.....	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Uraian Teoretis.....	18

2.1.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	18
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	20
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan.....	22
2.1.4 Pencemaran Lingkungan Hidup	24
2.1.5 Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	26
2.1.6 Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan	29
2.1.7 Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Penegakan Hukum Lingkungan	31
2.1.8 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Lingkungan Hidup.....	33
2.1.9 Kajian Putusan Pengadilan yang Relevan	34
2.1.10 Kerangka Konseptual	38
2.1.11 Bagan Alur Pemikiran	39
2.2 Uraian Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
3.1 Hasil Penelitian	44
3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
3.1.2 Bentuk Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	45
3.1.3 Data Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup	46
3.1.4 Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	47
3.1.5 Pelanggaran Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan	48
3.1.6 Hubungan Persetujuan Lingkungan dengan Pencegahan Pencemaran	50
3.1.7 Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup.....	51
3.1.8 Hubungan Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum Pidana.....	53

3.1.9 Penerapan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.....	54
3.1.10 Hambatan dan Upaya yang Ditemukan dalam Penelitian ..	55
3.1.11 Fakta Hukum yang Ditemukan.....	56
3.1.12 Kesesuaian Data Hasil Penelitian dengan Identifikasi Masalah	57
3.2 Pembahasan.....	58
3.2.2 Analisis Unsur Pasal 109 dan Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan	58
3.2.1 Pengaturan Hukum Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup ...	60
3.2.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	62
3.2.4 Dominasi Sanksi Administratif dalam Penanganan Pelanggaran Lingkungan di Kabupaten Majalengka	64
3.2.5 Analisis terhadap Belum Diterapkannya Persetujuan Pidana Pasal 109 di Pengadilan Negeri Majalengka.....	65
3.2.6 Hambatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Penerapan Persetujuan Konteks Pasal 109.....	67
3.2.7 Upaya Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Majalengka.....	70
3.2.8 Kesesuaian Pembahasan dengan Identifikasi Masalah.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	